

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

PROGRAM COMMUNITY ACTION PLAN

DKI Terus Benahi Kampung Kumuh

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus membenahi 200 RW kampung kumuh selama kurun waktu 2017-2022. Berdasarkan salinan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020, anggaran Community Action Plan (CAP) untuk satu RW sebesar Rp556 juta dengan rincian biaya langsung personel Rp475 juta dan biaya langsung tidak personel Rp29 juta.

Biaya langsung personel terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, dan surveyor. Sedangkan biaya langsung tidak personel yaitu laporan teknis *detail engineering design* (DED), pelaksanaan sosialisasi, serta *focus group discussion* (FGD).

Dalam penataan kampung kumuh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pendekatan berbeda dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Anies berkali-kali dalam beberapa sesi wawancara memerlukan konsep CAP sebagai solusi mengatasi masalah kekumuhan di lima wilayah Jakarta.

Kepala Dinas Perumahan

DKI Jakarta Kelik Indriyanto menyebutkan, ada empat tahapan membenahi kawasan kampung kumuh. Pertama, wali kota mengidentifikasi wilayahnya masing-masing yang dijadikan prioritas penataan kembali. Kedua, DKI menerapkan pendekatan CAP. Dari situ muncul kebutuhan warga berdasarkan tipologi masing-masing kampung.

Dalam CAP akan dikaji dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta komunitas. Setelah CAP selesai, Pemprov DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem Collaborative Implementation Plan (CIP).

DPRD DKI Jakarta mempertanyakan usulan Dinas Perumahan terkait CAP. Meskipun baru, KUA-PPAS kemungkinan bisa saja direvisi. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh terlalu mahal. "Satu RW itu Rp556 juta. Kalau 200 RW butuh berapa? Masa tidak bisa kerja sama dengan kampus

atau lembaga lainnya," ujarnya.

Dia melihat selama dua tahun ini tidak ada penataan kampung kumuh. Kegiatan yang dilakukan sebatas penataan trotoar atau jalur pedestrilan dan tambal sulam jalan. Sementara banyak permukiman kumuh dan padat di Jakarta yang tidak tersentuh pembangunan.

Prinsipnya dia setuju penataan kampung kumuh, namun terkait anggaran harus ada evaluasi. Dia akan minta penjelasan secara detail dalam pembahasan teknis. "Kami minta Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," kata Yuke.

Ketua Koordinator Komisi Dyang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik akan meminta penjelasan Dinas Perumahan terkait penataan kampung kumuh, khususnya anggaran CAP yang berfungsi sebagai konsultan. "Konsultan itu rumus biayanya 2% dari total pelaksanaan kegiatan. Kalau hampir Rp600 juta, berapa usulan pembangunannya?" ujarnya.

Terdapat 69 RW dalam penyusunan CAP di KUA-PPAS 2020 yang tersebar di lima wilayah Jakarta. Jakarta Pusat di Kelurahan Karet Tengsin (1 RW), Kebon Melati (1 RW), Petamburan (1 RW), Kebon Kacang (1 RW), Kampung Bali (1 RW), Menteng (2 RW), Pegangsaan (2 RW), Mangga Dua Selatan (2 RW), Karang Anyar (2 RW), Kampung Rawa (5 RW), Tanah Tinggi (4 RW), Galur (1 RW). Di Jakarta Utara, penyusunan CAP di Semper Timur (1 RW) dan Sukapura (3 RW).

Di Jakarta Barat, Jembatan Lima (1 RW), Kembangan Utara (2 RW), Wijaya Kusuma (5 RW), Krengdang (2 RW), Pekojan (3 RW), Krukut (3 RW kumuh), Kalideres (3 RW kumuh), Palmerah (2 RW kumuh), dan Tangki (1 RW kumuh).

Di Jakarta Selatan, penyusunan CAP di Gandaria Utara (3 RW), Pela Mampang (3 RW), Manggarai (4 RW), Menteng Atas (1 RW), Pasar Manggis (2 RW). Sementara penyusunan CAP di Jakarta Timur, yaitu Duren Sawit (1 RW), Jatinegara (1 RW), Pulo Gadung (1 RW), Pondok Bambu (1 RW), serta Rawa Terate (4 RW).

• bima setiyadi